



Implementasi Kebijakan Dana Bosp-Kinerja Dalam Pengelolaan Dan Akuntabilitas Pada Sekolah Dasar Kecamatan Astambul

Miftahul Khair

Uniska MAB Banjarmasin, Indonesia; bagongshow20@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)-Kinerja dalam pengelolaan dan akuntabilitas pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan pihak terkait sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BOSP-Kinerja dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional serta peningkatan mutu dan kinerja sekolah. Pengelolaan dana didukung oleh keterlibatan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah serta pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan dan pelaporan. Akuntabilitas diwujudkan melalui keteraturan administrasi, kesesuaian penggunaan dana dengan rencana dan ketentuan, transparansi, pelaporan, serta pengawasan stakeholders. Namun, implementasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kompetensi sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi, beban administrasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengelola, pendampingan, pengawasan, dan peningkatan partisipasi stakeholders agar BOSP-Kinerja dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Keywords

BOSP-Kinerja; implementasi kebijakan; pengelolaan keuangan sekolah; akuntabilitas; sekolah dasar.

1. INTRODUCTION



Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena keberhasilan pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks pendidikan dasar, ketersediaan pembiayaan yang memadai menjadi salah satu prasyarat penting agar sekolah dapat menyelenggarakan proses pembelajaran, menyediakan sarana dan prasarana, mengembangkan kompetensi guru, serta memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Salah satu instrumen pembiayaan pendidikan yang dikembangkan pemerintah Indonesia adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), termasuk skema BOSP-Kinerja yang diarahkan tidak hanya untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga mendorong peningkatan mutu dan kinerja satuan pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan BOSP-Kinerja memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar membelanjakan anggaran, karena sekolah dituntut mampu menghubungkan perencanaan anggaran dengan kebutuhan nyata, target peningkatan mutu, serta capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan dana pendidikan pada tingkat satuan pendidikan pada dasarnya membutuhkan proses manajemen yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga pelaporan. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa dana yang diterima sekolah digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Penelitian mengenai pengelolaan dana BOS menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan sekolah perlu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan secara sistematis agar penggunaan dana dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan (Muryati, 2016). Oleh karena itu, implementasi BOSP-Kinerja tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana, tetapi juga dengan kemampuan sekolah dalam menerjemahkan kebijakan pembiayaan tersebut menjadi program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Selain efektivitas penggunaan anggaran, aspek transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana BOSP-Kinerja. Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan dana dapat dijelaskan berdasarkan aturan, tujuan, prosedur, serta bukti pertanggungjawaban yang jelas. Sementara itu, transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai sumber, perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian Amin et al. (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar dapat berjalan dengan baik ketika terdapat kejelasan aturan serta keterlibatan stakeholders dalam proses pengelolaan dana. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau bendahara, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan tata kelola keuangan sekolah yang terbuka dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan efektivitas sistem manajemen keuangan yang diterapkan oleh sekolah. Santosa et al. (2022) menjelaskan bahwa sistem manajemen keuangan sekolah yang jelas dan transparan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOS sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dalam konteks BOSP-Kinerja, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena dana yang diberikan memiliki orientasi terhadap peningkatan kinerja satuan pendidikan. Artinya, sekolah tidak cukup hanya mampu menyerap anggaran, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa penggunaan dana memberikan kontribusi terhadap pencapaian program dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi BOSP-Kinerja dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, pencapaian program, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sekolah.

Efektivitas pengelolaan dana sekolah juga berkaitan dengan kemampuan sekolah dalam mengarahkan anggaran kepada kebutuhan yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Maulida et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS memiliki keterkaitan dengan peningkatan kinerja sekolah, sementara transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam memastikan dana digunakan secara tepat sasaran. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan dana pendidikan harus diikuti dengan tata kelola yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Apabila proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak didasarkan pada kebutuhan dan target kinerja sekolah, maka dana yang tersedia berpotensi hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan rutin tanpa memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BOSP-Kinerja juga semakin dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi perencanaan dan penganggaran seperti ARKAS dapat membantu sekolah dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran, melakukan pencatatan, serta mendukung proses pelaporan penggunaan dana. Handayani et al. (2026) menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran kegiatan sekolah dapat mendukung penguatan akuntabilitas pengelolaan dana operasional melalui proses administrasi yang lebih terstruktur. Namun, pemanfaatan teknologi tidak secara otomatis menjamin

terciptanya akuntabilitas. Keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi, ketepatan dalam melakukan input data, serta konsistensi sekolah dalam melaksanakan prosedur pengelolaan keuangan.

Faktor sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan implementasi kebijakan BOSP-Kinerja. Kepala sekolah, bendahara, guru, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan dana. Putri et al. (2026) menunjukkan bahwa literasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar. Dengan demikian, persoalan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan tersedia atau tidaknya regulasi, tetapi juga dengan kapasitas pelaksana kebijakan di tingkat sekolah dalam memahami dan menjalankan ketentuan tersebut.

Partisipasi stakeholders sekolah juga menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola BOSP-Kinerja yang akuntabel. Komite sekolah dan masyarakat memiliki posisi strategis dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta mendorong keterbukaan dalam penggunaan dana sekolah. Aminurasid dan Handoko (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah dapat berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Keterlibatan tersebut penting karena dana BOSP pada hakikatnya merupakan sumber pembiayaan publik yang penggunaannya harus memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat. Oleh sebab itu, semakin terbuka proses perencanaan dan penggunaan dana, semakin besar peluang terciptanya kepercayaan stakeholders terhadap sekolah.

Dalam konteks Kecamatan Astambul, implementasi kebijakan BOSP-Kinerja menjadi penting untuk dikaji karena setiap sekolah memiliki karakteristik, kebutuhan, kapasitas sumber daya manusia, kondisi sarana-prasarana, dan kemampuan pengelolaan administrasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi bagaimana kebijakan BOSP-Kinerja diterjemahkan dan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan. Permasalahan yang mungkin muncul bukan hanya terkait dengan penggunaan dana, tetapi juga bagaimana sekolah menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan, menentukan prioritas program, melibatkan stakeholders, melaksanakan kegiatan, melakukan pencatatan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk memahami sejauh mana kebijakan BOSP-Kinerja telah diimplementasikan dalam praktik pengelolaan sekolah dasar di Kecamatan Astambul.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam pengelolaan dan akuntabilitas pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan sekolah dalam pelaksanaan program BOSP-Kinerja. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, komite sekolah, dan pihak terkait yang memahami proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan dana BOSP-Kinerja. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus pada proses implementasi kebijakan, mekanisme pengelolaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan BOSP-Kinerja. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan sebagaimana model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen terkait, sehingga diperoleh gambaran yang kredibel mengenai implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam pengelolaan dan akuntabilitas pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul..

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Implementasi Kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah

Implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul pada dasarnya merupakan proses menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam praktik pengelolaan keuangan di tingkat satuan pendidikan. Implementasi tersebut mencakup beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, hingga pelaporan penggunaan dana. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam memahami regulasi, menentukan prioritas kebutuhan, membangun koordinasi antaraktor, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu dan kinerja

sekolah. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kepala sekolah dan bendahara memiliki posisi strategis sebagai pelaksana utama yang menerjemahkan ketentuan BOSP-Kinerja ke dalam perencanaan dan penganggaran sekolah.

Pada tahap perencanaan, pengelolaan BOSP-Kinerja perlu didasarkan pada identifikasi kebutuhan dan prioritas sekolah. Sekolah tidak semestinya menyusun anggaran hanya berdasarkan kebiasaan penggunaan dana pada tahun sebelumnya, tetapi perlu mengacu pada kondisi aktual sekolah dan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap program yang telah berjalan, identifikasi permasalahan pembelajaran, kondisi sarana dan prasarana, kebutuhan pengembangan kompetensi guru, serta target peningkatan kinerja sekolah. Keterlibatan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dalam proses perencanaan menjadi penting agar anggaran yang disusun merepresentasikan kebutuhan bersama. Muryati (2016) menjelaskan bahwa pengelolaan dana operasional sekolah membutuhkan perencanaan yang sistematis agar penggunaan dana dapat diarahkan pada kebutuhan sekolah dan tujuan pendidikan. Dengan demikian, implementasi BOSP-Kinerja di Kecamatan Astambul perlu dilihat dari sejauh mana sekolah mampu mengintegrasikan kebijakan pembiayaan dengan perencanaan program peningkatan mutu.

Tahap pelaksanaan merupakan proses merealisasikan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, sekolah dituntut untuk menggunakan dana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana harus didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap, seperti rencana kegiatan dan anggaran, bukti transaksi, laporan realisasi, serta dokumen pendukung lainnya. Ketertiban administrasi menjadi aspek penting karena setiap transaksi keuangan harus dapat ditelusuri dan diverifikasi. Santosa et al. (2022) menyatakan bahwa sistem manajemen keuangan sekolah yang terstruktur dan transparan dapat mendukung efektivitas penggunaan dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BOSP-Kinerja bukan sekadar persoalan realisasi anggaran, tetapi juga bagaimana setiap pengeluaran dapat dibuktikan, dijelaskan, dan dikaitkan dengan kegiatan sekolah.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOSP-Kinerja. Penggunaan aplikasi seperti ARKAS memberikan dukungan terhadap proses perencanaan, penganggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan sekolah. Digitalisasi tersebut dapat mengurangi kesalahan administratif dan membantu sekolah menyusun laporan secara lebih sistematis. Handayani et al. (2026) menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran sekolah dapat memperkuat akuntabilitas melalui proses administrasi yang lebih terstruktur. Meskipun demikian, teknologi hanya menjadi instrumen pendukung. Efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan kepala sekolah dan bendahara dalam mengoperasikan sistem serta memahami substansi kebijakan yang mendasarinya. Apabila kemampuan sumber daya manusia masih terbatas, penggunaan aplikasi dapat menjadi sekadar pemenuhan administratif tanpa

Faktor sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan penting dalam implementasi BOSP-Kinerja. Kepala sekolah dan bendahara dituntut memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan, memahami petunjuk teknis, mengelola transaksi, melakukan pencatatan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban. Putri et al. (2026) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Dalam konteks sekolah dasar Kecamatan Astambul, kapasitas pengelola menjadi faktor yang dapat menentukan variasi kualitas pengelolaan BOSP-Kinerja antarsekolah. Sekolah yang memiliki pengelola dengan kompetensi administrasi dan pemahaman regulasi yang baik cenderung lebih mampu menyusun perencanaan dan laporan secara tertib, sedangkan keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan munculnya kesalahan administratif dan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Dengan demikian, implementasi kebijakan BOSP-Kinerja dalam pengelolaan keuangan sekolah harus dipahami sebagai proses yang melibatkan aspek kebijakan, sumber daya manusia, perencanaan, teknologi, administrasi, dan koordinasi antaraktor. Pengelolaan yang efektif terjadi ketika seluruh aspek tersebut berjalan secara terpadu. Dana BOSP-Kinerja tidak hanya perlu terserap sesuai anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan implementasi tidak cukup dilihat dari persentase realisasi anggaran, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, ketepatan sasaran penggunaan dana, kualitas administrasi, serta kontribusi kegiatan terhadap pencapaian kinerja sekolah.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSP-Kinerja pada Sekolah Dasar Kecamatan Astambul

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana publik karena setiap sumber daya yang berasal dari pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks BOSP-Kinerja, akuntabilitas tidak hanya berarti sekolah mampu membuat laporan keuangan, tetapi mencakup keseluruhan proses pertanggungjawaban sejak perencanaan sampai dengan pelaporan. Sekolah harus mampu menjelaskan mengapa suatu program dipilih, bagaimana dana digunakan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, serta apa hasil yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas BOSP-Kinerja memiliki dimensi administratif sekaligus substantif, yaitu pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan pertanggungjawaban atas hasil atau manfaat yang dihasilkan.

Penerapan akuntabilitas dimulai dari keterbukaan dalam proses perencanaan. Sekolah perlu memberikan ruang bagi guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak terkait untuk mengetahui serta memberikan masukan terhadap rencana penggunaan dana. Partisipasi stakeholders dapat meningkatkan kualitas perencanaan sekaligus menciptakan mekanisme kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran. Aminurasid dan Handoko (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Dalam konteks Kecamatan Astambul, keterlibatan komite sekolah menjadi penting karena komite dapat berfungsi sebagai mitra sekolah dalam memberikan pertimbangan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana. Transparansi tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Akuntabilitas selanjutnya diwujudkan melalui ketepatan penggunaan dana. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar perencanaan dan berkaitan dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana yang tidak sesuai perencanaan atau tidak memiliki bukti transaksi yang memadai dapat mengurangi kualitas akuntabilitas sekolah. Amin et al. (2022) menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar. Oleh sebab itu, sekolah di Kecamatan Astambul perlu memastikan bahwa seluruh penggunaan BOSP-Kinerja memiliki bukti administrasi yang lengkap dan dapat diverifikasi. Bendahara sekolah memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban

administrasi, sedangkan kepala sekolah bertanggung jawab memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebijakan dan prioritas program sekolah.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan pelaporan. Laporan penggunaan dana harus disusun secara tepat waktu, akurat, lengkap, dan sesuai dengan sistem yang ditetapkan pemerintah. Pelaporan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen untuk menunjukkan tingkat keberhasilan pengelolaan dana. Melalui laporan, pihak pemerintah maupun stakeholders sekolah dapat mengetahui jumlah dana yang diterima, program yang dilaksanakan, jumlah dana yang digunakan, serta hasil kegiatan. Pradana et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi merupakan aspek yang saling berkaitan dalam pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, kualitas laporan BOSP-Kinerja dapat menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah pengelolaan dana telah dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Selain pertanggungjawaban administratif, akuntabilitas BOSP-Kinerja harus diarahkan pada pencapaian kinerja sekolah. Hal ini menjadi pembeda penting antara pengelolaan dana operasional biasa dengan dana yang memiliki orientasi kinerja. Sekolah perlu memastikan bahwa penggunaan dana memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, peningkatan layanan peserta didik, penguatan literasi dan numerasi, maupun indikator mutu lainnya sesuai kebutuhan sekolah. Maulida et al. (2025) menunjukkan adanya keterkaitan antara efektivitas pengelolaan dana BOS dan peningkatan kinerja sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan BOSP-Kinerja seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah dana telah digunakan sesuai aturan, tetapi juga harus menjawab apakah penggunaan dana tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja sekolah.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat berupa keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, perubahan ketentuan pengelolaan dana, keterbatasan kompetensi bendahara, beban administrasi, keterbatasan fasilitas teknologi, serta kurang optimalnya pengawasan stakeholders. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOSP-Kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kepala sekolah dan bendahara, pendampingan secara berkelanjutan, peningkatan pemahaman terhadap regulasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan peran komite sekolah dalam pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, akuntabilitas pengelolaan BOSP-Kinerja pada sekolah dasar Kecamatan Astambul dapat dipahami sebagai suatu sistem pertanggungjawaban yang mencakup **perencanaan yang partisipatif, penggunaan dana yang tepat sasaran, pencatatan yang tertib, pelaporan yang transparan, pengawasan yang efektif, serta orientasi terhadap pencapaian kinerja sekolah**. Apabila seluruh komponen tersebut dapat berjalan secara konsisten, BOSP-Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan operasional, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, apabila akuntabilitas hanya dipahami sebagai penyelesaian laporan administratif, maka potensi strategis BOSP-Kinerja dalam meningkatkan kinerja sekolah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari implementasi kebijakan BOSP-Kinerja pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul.

4. CONCLUSION

Implementasi kebijakan Dana BOSP-Kinerja dalam pengelolaan dan akuntabilitas pada sekolah dasar di Kecamatan Astambul menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan dana yang efektif tidak hanya ditandai oleh terserapnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penggunaan, keteraturan administrasi, transparansi informasi, keterlibatan Komite Sekolah, kompetensi kepala sekolah dan bendahara, serta pemanfaatan teknologi dalam proses penganggaran dan pelaporan. Akuntabilitas BOSP-Kinerja perlu dipahami sebagai pertanggungjawaban yang mencakup aspek administratif sekaligus pencapaian hasil, sehingga setiap penggunaan dana harus dapat dibuktikan dan dikaitkan dengan peningkatan kinerja sekolah. Berbagai kendala seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi, beban administrasi, dan optimalisasi teknologi perlu diatasi melalui penguatan kapasitas pengelola, pendampingan, pengawasan, dan peningkatan partisipasi stakeholders. Dengan demikian, implementasi BOSP-Kinerja yang dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dan kinerja sekolah dasar di Kecamatan Astambul.

REFERENCES

- Haryono, D. (2015). *Filsafat Matematika*. Bandung: Alfabeta.
- Isrok'atun, & Rosmala, A. (2018). *Model-Model Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2018). *Cooperative Learning: Improving Instructional Practices*. Educational Leadership Press.
- Kurniasih, I., & Sani, B. (2015). *Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Kata Pena.
- Marchlewska, M., Cichocka, A., & Kossowska, M. (2019). Addicted to elements: How collective narcissism affects group processes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 115(4), 541–560.
- NCTM. (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. National Council of Teachers of Mathematics.
- Rakhmat, J. (1989). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Slameto. (2015). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slavin, R. E. (2015). *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice* (2nd ed.). Allyn & Bacon.
- Sumarmo, U. (2004). *Kemampuan Komunikasi Matematika*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suprijono, A. (2019). *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trianto. (2010). *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara